

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan mengenai pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Belanja Modal :

1. Pengujian secara parsial memberikan hasil Derajat Desentralisasi Fiskal (X_1) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa apabila derajat desentralisasi fiskal mengalami kenaikan, maka belanja modal akan meningkat. Karena, dalam penerapan derajat desentralisasi fiskal suatu daerah, agar daerah tersebut menjadi lebih baik pemerintah dituntut agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dengan cara menggali potensi penerimaan secara mandiri dalam membangun juga mengembangkan perekonomian pemerintahan daerah. Dengan kata lain bahwa besaran kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang baik menghasilkan PAD yang didapatkan oleh daerah lebih dialokasikan ke belanja modal dan juga sudah optimalnya dalam melaksanakan desentralisasi fiskal.
2. Pengujian secara parsial memberikan hasil Ketergantungan Keuangan Daerah (X_2) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa semakin meningkatnya ketergantungan keuangan daerah akan meningkatkan belanja modal. Dengan kata lain bahwa besaran pendapatan transfer yang berasal dari DAU memberikan kontribusi yang tinggi penggunaannya lebih banyak digunakan untuk menutup kebutuhan belanja modal.
3. Pengujian secara parsial memberikan hasil Tingkat Pembiayaan SiLPA (X_3) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dikarenakan

sebagian atau seluruh SiLPA pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan lebih diprioritaskan untuk belanja modal yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau digunakan untuk pemakaian modal dalam program dan kegiatan pemerintahan daerah tersebut. SiLPA tahun lalu merupakan sumber dari penerimaan pada tahun berikutnya dalam membiayai defisit anggaran tahun tersebut. Dengan demikian besarnya SiLPA tahun lalu dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan besaran defisit anggaran berjalan yang masih mungkin dibiayai melalui pembiayaan netto.

4. Pengujian secara simultan memberikan hasil Derajat Desentralisasi Fiskal (X_1), Ketergantungan Keuangan Daerah (X_2), dan Tingkat Pembiayaan SiLPA (X_3) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi linier yang terbentuk dengan melibatkan 3 variabel tersebut sangat layak untuk memprediksi variasi nilai variabel belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Karena pada dasarnya pengujian simultan beberapa variabel independen terhadap variabel dependen bertujuan untuk memberikan gambaran kelayakan model regresi yang dihasilkan.
5. Berdasarkan hasil uji simultan antara variabel Derajat Desentralisasi Fiskal (X_1), Ketergantungan Keuangan Daerah (X_2), dan Tingkat Pembiayaan SiLPA (X_3) terhadap belanja modal diatas, diperoleh nilai R Square sebesar 0,495 atau sebesar 49,5%. Hal ini berarti bahwa 49,5% variasi belanja modal dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen tersebut yaitu derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah dan tingkat pembiayaan SiLPA. Sedangkan sisanya sebesar 50,5% ($100\% - 49,5\% = 50,5\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan agar dapat terus mengoptimalkan penerimaan asli daerahnya, karena pemerintah daerah dapat mengelola pendapatan ini untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi hal yang penting untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya tunggal dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui potensi-potensi yang ada di tiap tiap daerah administrasinya dan diharapkan agar sebaiknya lebih memperhatikan pengalokasian belanja modal di tahun-tahun yang akan datang hal ini dikarenakan dengan meningkatnya penerimaan asli daerah maka daerah dapat secara lebih leluasa dalam melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan manusianya dalam rangka memberikan pelayanan publik untuk masyarakat.
2. Dengan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) diharapkan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan agar bisa mengalokasikan ke belanja modal sehingga dana yang diperoleh untuk belanja modal akan meningkat dan pembangunan terhadap infrastruktur juga meningkat.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel independen yang memungkinkan dapat berpengaruh terhadap belanja modal dan penelitian ini hanya menggunakan daerah yang terdapat di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan daerah yang ada di Kabupaten/Kota lain maupun di provinsi lain, sehingga dapat dilihat sudah seberapa besar keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja daerah.